PENGANGKATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh:

Fransiska Novita Eleanora

Abstract

Adoption (adoption), is an act of taking someone else's child into her own family, and thus among others who took the child and raised raised a legal relationship. Rapture is a form of child protection, due terjaminnya child survival, child rights are protected, so that children can run with good future. UU no. 23 of 2002 on the protection of children, do not allow lifting the child, if his biological parents are still alive, unless the child is an orphan status. The method used is a literature study (normative), aim, to find out how the child adoption and the legal consequences under the law, as well as whether the adoption is a form of child protection. The result is the removal of a child is a form of child protection, because in accordance with the principles of the convention of children (child protection principles)

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan berkembang, dan berpartisipasi, secara bernegara, pengakuan akan jaminan akan optimal sesuai dengan harkat dan martabat hak-hak asasi manusia sudah tercantum kemanusiaan serta mendapat perlindungan dalam pembukaan UUD 1945, dimana dari kekerasan dan diskriminasi, dan hal salah satu hak tersebut adalah hak untuk tersebut dapat terpenuhi dengan hidup, dan itu merupakan anugerah Tuhan pengangkatan anak. (H. Achmad kamil & Yang Maha Esa, yang diberikan kepada HM. Fauzan; 59)

manusia sejak lahir.

Perwujudan hak-hak hidup terhadap telah menjadi kebutuhan masyarakat dan seorang anak merupakan upaya menjadi bagian dari sistem kekeluargaan. perlindungan terhadap anak, dan Oleh karena itu, lembaga pengangkatan perlindungan anak angkat tersebut anak (adopsi), yang telah menjadi bagian menjamin dan melindungi anak dan hak- budaya masyarakat akan mengikuti

perkembangan situasi dan kondisi, seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda, serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat daerah, walaupun diIndonesia masalah pengangkatan anak belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.

Karena Negara dan Pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya, tidak terlepas dari peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga pendidikan dan organisasi dunia usaha.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hakim dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum. Pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat tersebut, maupun orang tua angkat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan

anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial anak

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang perlu dikaji adalah : Bagaimanakah Pengangkatan Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ? Apakah Pengangkatan Anak merupakan wujud perlindungan anak?

PEMBAHASAN

1. Pengangkatan Anak dan Anak Angkat

Pengangkatan anak (*adopsi*), adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang lain yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum (Soedharyo Soimin; 35)

Dari segi Terminologi, *Adopsi* diartikan:

- a. Dalam kamus umum **Bahasa Indonesia** dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil

dan disamakan dengan anaknya sendiri”

- b. Dalam **Ensiklopedia Umum** disebutkan :

Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atas untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak.

(<http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pengangkatan-anak-dalam-sistem.html>, diunduh 15 Juli 2016, jam. 21.27 wib)

Mengenai pengangkatan anak, (*adopsi/ambil anak*), ini ada beberapa macam, yaitu antara lain : a) Pengangkatan anak yang sama sekali bukan dari keluarga / kerabatnya, b) Pengangkatan anak dari kalangan keluarga sendiri, c) Pengangkatan anak dari kalangan / kemenakan / keponakan (baik laki-laki aau perempuan). (PNH Simanjuntak; 195-196)

knya

mum

untuk

orang

dalam

ngan.

untuk

untuk

tua

anak.

co.id

t-

h 15

anak,

erapa

katan

uarga

dari

c)

an /

ki aau

196)

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diadakan dalam rangka melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya merumuskan pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

Tujuan Pengangkatan Anak

- Kesejahteraan Anak
 - Kepentingan yang terbaik bagi Anak
 - Memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat (Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014; 106)
 - Meneruskan keturunan
- Motivasi suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat

mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarga. (Rusli Pandika; 106)

Sifat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan “perbuatan hukum” (*rechtshandeling* ; *legal act*), perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku. Akibat hukum yang timbul adalah beralihnya anak dari suatu lingkungan ke lingkungan keluarga yang lain

Dari peraturan-perundangan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasi beberapa sifat (*legal nature*), pengangkatan anak di Indonesia, yaitu : a) Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. Menimbulkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat, b) Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan si anak. Peran lembaga pengangkatan anak terbuka kemungkinannya untuk kepentingannya lebih terlindungi, pemeliharaan dan

kesejahteraannya lebih baik, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi, c) Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Peraturan perundangan Indonesia tentang anak menetapkan kebijakan untuk melindungi hak anak dalam menjalankan ibadah menurut agamanya, dan selaras dengan itu maka agama calon orang tua yang mengangkat harus sama dengan agama yang dianut anak yang diangkat, d) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Sesuai dengan kaidah hukum syariah yang berkenaan dengan pengangkatan anak, hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh stblaad. 1917-129

Dari segi hukum nasional Indonesia, Prinsip ini menimbulkan sejumlah konsekwensi, antara lain : a) Berlaku larangan perkawinan karena hubungan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 butir a dan b Undang-Undang Perkawinan 1974, b) Tindak-tindak pidana

yang ditentukan antara lain dalam Pasal 221 ayat (2), Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). c) Pembuktian dengan saksi tersebut dalam Pasal 145 & 146 Reglement Acara Perdata Indonesia yang diperbarui (HIR), serta Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

a. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal usulnya dan orang tua asalnya

Hak ini diberikan oleh undang-undang tersebut mengakui bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tua dan asal-usulnya, dengan tujuan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya

b. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan Penetapan atau Putusan Pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat

am Pasal
Pasal 295
g-Undang
mbuktian
al 145 &
Indonesia
asal 168
n Acara
ak angkat
rang tua
g-undang
iap anak
dan asal-
untuk
ilah dan
an orang
anak
pan atau
kecuali
kan adat

Peraturan perundangan, menegaskan
peran pengadilan untuk mengesahkan
pengangkatan anak dalam bentuk
Penetapan atau Putusan, yang dengan
penegakan ini akan lebih memberi
kepastian hukum tentang keabsahan
(*validitas*) pengangkatan anak di
Indonesia. Adanya bukti “putusan”
pengadilan merupakan syarat bagi
Pejabat Imigrasi Indonesia untuk dapat
menertibkan paspor bagi seorang anak
Warga Negara Indonesia yang diangkat
oleh Warga Negara Asing
c. Bimbingan dan Pengawasan oleh
Pemerintah dan Masyarakat
Pengangkatan anak bukan sekedar
urusan atau kepentingan pribadi-
pribadi yang mengangkat dan calon
anak angkat beserta orang tua
kandungnya, tetapi menjadi
kepentingan masyarakat dan Negara.
Di samping orang tua, menurut UU
Perlindungan anak, Negara dan
masyarakat, memikul tanggung jawab
untuk melindungi anak

Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Terkait dengan tujuan mengangkat anak
membawa akibat hukum bagi pengangkatan
anak yang diuraikan dalam Staatblad 1927
No.129, yakni : 1) Anak angkat secara
hukum memperoleh nama dari bapak
angkat (pasal 11). 2) Anak angkat dijadikan
sebagai anak yang dilahirkan dari
perkawinan orang tua angkat (pasal 12 ayat
1). 3) Anak angkat menjadi ahli waris orang
tua angkat. 4) Karena pengangkatan anak,
terputus segala hubungan perdata yang
berpangkal pada keturunan karena kelahiran
(antara anak dengan orang tua kandung)
(<http://rachmiamrinal.blogspot.co.id/2009/06/adopsi.html>), diunduh, Jumat, 15 Juli
2016, Jam 21.53 Wib)
Anak yang berstatus Warga Negara
Indonesia yang diangkat anak oleh Warga
Negara Asing itu dimohon agar anak itu
dibuatkan paspor, maka paspor itu hanya
dapat diberikan apabila terdapat bukti
adanya Putusan Pengangkatan Anak dari
pengadilan di daerah hukum tempat tinggal
(asal) anak tersebut.

Menyimpang dari apa yang diuraikan diatas, khusus untuk pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) dalam suatu komunitas yang nyata-nyata menerapkan adat dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, maka pengangkatan dapat dilakukan menurut adat kebiasaan setempat, sehingga keabsahan (*validitas*) ditentukan oleh adat dan kebiasaan itu, tetapi pengangkatan anak ini “dapat” – bukan keharusan – dimohonkan Penetapan dari Pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum. (Rusli Pandika; 112)

Perlindungan Anak

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

(<https://www.google.co.id/#q=pengertian+perlindungan+anak>, di unduh, Jumat, 15 Juli 2016, Jam. 19.0 wib)

Hadi supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua / keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*)

Salah satu orang diantara para aktivis perempuan itu adalah *Eglantyne Jebb*, yang kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *menyelamatkan anak-anak dan mendanai dengan bantuan serikat Internasional* yang berupa : a) Anak harus dilindungi diluar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan, b) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga, c) Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual, d) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak

ahwa
pihak
arga,
elaku
body)),
anak
mban

para
ntyne
ngkan
anak
enjadi
danai
yang
dilu
ngsaan
elihara
tuan
arana-
untuk
aterial,
lapar
harus
tubuh
n anak

terlantar harus diurus /diberi pemahaman, e) Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan / pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan, f) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, g) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat

Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 4 (*empat*) prinsip umum perlindungan yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain :

1) Prinsip Nondiskriminasi

Pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini

bagi setiap anak yang berada diwilayah hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain atau status lainnya baik dari si anak tersendiri, ”

Ayat (2) : “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman, yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua, walinya yang sah atau anggota keluarganya”(M. Nasir Djamil; 24-25)

Prinsip ini tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. (Rika Saraswati; 25)

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak
(*Best Interest of The Child*)

Pasal 3 KHA ayat (1) :

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang membuat ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran.

3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup & Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Pasal 6 KHA ayat (1) : “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”.

Ayat (2) : Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.

Prinsip sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya, karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut, maka negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Pasal 12 ayat (1) KHA : "Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dan semua hal yang mempengaruhi si anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak."

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, tidak bisa dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama. (M. Nasir Djamil; 29-31)

UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Pengangkatan Anak diatur dalam Pasal 39-41 UU No. 23 Tahun 2002, mengisyaratkan bahwa Pengangkatan adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum pengangkatan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada para orangtua.

1. Alasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menolak Pengangkatan Anak dikarenakan :

a. Asas perlindungan anak, mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak atas perlindungan orangtuanya, dan orangtuanya wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara, dengan adanya pengangkatan anak memutuskan

- hubungan anak dengan orang tua kandungnya
- b. Dalam proses pengangkatan anak, anak yang diangkat tidak mempunyai kedudukan sama sebagai pihak yang membuat persetujuan, dalam memilih anak terjadi tawar-menawar, penyerahan sejumlah uang sebagai imbalan
- c. Pengangkatan anak pada hakikatnya memutuskan hubungan antara ayah kandung dan anak kandung, menghambat ayah kandung melaksanakan dan mewujudkan tanggung jawabnya teradap anak kandungnya dalam rangka melindungi anak (mental, fisik, sosial), pengangkat anak tidak memberikan kesempatan anak melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap orangtua kandungnya, hal ini tidak mendidik dan membangun kepribadian seorang anak
- d. Anak dikorbankan untuk kepentingan tertentu, orang tua angkat dan orangtuanya sendiri serta juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengangkatan anak
- e. Hubungan anak dengan orangtua kandung bisa menimbulkan perpecahan, kecukupan kemakmuran material tidak dapat dipakai sebagai ukuran untuk memberikan kesejahteraan anak
- f. Pemeliharaan dan pembinaan anak kandung dapat diserahkan atau dapat dilakukan oleh orang lain tanpa harus menyerahkan anak kandung untuk diangkat oleh yang bersangkutan, penyerahan ini berarti juga melepaskan diri dari tanggung jawab untuk memelihara dan membina anak kandung sendiri, dan jika ternyata terdapat uang imbalan untuk penyerahan anak tersebut, maka tindakannya merupakan suatu tindakan penjualan anak
- g. Pengangkatan anak secara langsung dan tidak langsung menyangkut kepentingan pelayanan anak yang

- dapat membuat dampak positif dan negatif pada masa depan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu perlu adanya usaha pencegahan penyalahgunaan pengangkatan anak secara individual dan kolektif yang menyebabkan anak menjadi korban (mental, fisik, sosial)
- h. Pengangkatan anak menyangkut nasib anak yang harus dilindungi. Karena itu pengangkatan anak menjadi pokok perhatian perlindungan anak, serta pelaksanaannya harus diamankan oleh hukum perlindungan anak demi perlakuan yang adil dan kesejahteraan anak
- i. Jika dilihat dari proporsi pengangkatan anak secara dimensional, pertama-tama dan terutama tidak merupakan usaha memperjuangkan kepentingan anak tetapi kepentingan orang dewasa, para orangtua, dan para perantara, pelaksana yang terlibat, dengan demikian, pengangkatan anak dapat dikatakan sebagai urusan orang dewasa dan bukan urusan anak
- j. Jika dilihat dari neraca (*balans*) keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan pengangkatan anak, jelaslah sudah pengangkatan anak bukanlah jalan atau / cara terbaik untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan anak dan orangtua kandung sekeluarga dan pengangkatan anak hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan tidak harus bertentangan dengan asas-asas perlindungan anak
- Dengan demikian, betapa kompleksnya persoalan pengangkatan ini, karena anak tidak dapat melindungi dirinya, dan menjadi korban struktural dan nonstruktural, serta sebagai hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Yang penting sekarang adalah fenomena mana yang relevan dan dominan yang mempengaruhi adanya pengangkatan anak.

Hal ini adalah penting dalam rangka menentukan kebijaksanaan untuk menyusun strategi dan taktik mengatasi permasalahan pelaksanaan pengangkatan anak. Yang rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk anak yang bersangkutan. (Arif Gosita; 52-55)

2. Tindakan Pencegahan Pengangkatan Anak

Pada dasarnya pengangkatan anak tidak dapat diterima menurut asas-asas perlindungan anak tertentu. Pelaksanaan pengangkatan anak dianggap tidak rasional positif tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut serta bertentangan dengan asas perlindungan anak serta kurang bermanfaat bagi anak yang bersangkutan.

Mencegah berkembangnya pelaksanaan pengangkatan anak dengan berbagai cara yang rasional positif, dapat dipertimbangkan, dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk yang bersangkutan.

Tindakan pencegahan pelaksanaan

pengangkatan anak adalah antara lain, sebagai berikut :

Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan perbaikan atau tindakan pemberian sanksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan, penyalahgunaan kekuasaan / wewenang.

Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis daripada usaha-usaha perbaikan atau pemberian sanksi. Usaha pencegahan dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti usaha perbaikan dan pemberian sanksi.

Tindakan pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain : stigmatisasi, pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, kebencian atau permusuhan

Tindakan pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab

terhadap sesama manusia, sesama anggota masyarakat. Usaha pencegahan pengangkatan anak serta permasalahannya dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik, dan sosial seseorang.

Menurut penulis, sebenarnya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan, jika status anak tersebut tidak mempunyai ayah dan ibu lagi (*yatim piatu*), sehingga dapat diberikan perlindungan terhadapnya, akan pemenuhan hak-haknya sebagai layaknya anak kandung, jika orang tua angkat tersebut, memang berniat mengangkat anak tersebut.

Dan untuk kekuatan hukum, agar tidak ada pertentangan dikemudian hari, maka pengangkatan anak harus disahkan melalui penetapan pengadilan, sehingga ada salinan surat yang dapat digunakan sebagai bukti yang kuat terhadap anak yang diangkat tersebut, hal tersebut dilakukan agar anak yang diangkat tersebut dapat mempunyai kepastian hukum, akan dirinya dan

orang tua angkatnya, karena nantinya akan menyangkut pemenuhan hak-haknya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kelangsungan hidup dan kepentingan yang terbaik bagi anak, dan tidak diperbolehkan mengambil anak, dari orang tua kandungnya dikarenakan anak tersebut dianggap tidak melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap orang tua kandungnya
2. Pengangkatan anak merupakan wujud perlindungan anak, dikarenakan sesuai dengan asas-asas perlindungan anak, yaitu mengedepankan hak-hak anak

Saran

1. Anak yang diangkat tidak boleh memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya serta harus diberitahukan asal usul anak tersebut serta orang tua kandungnya, dan jika pengangkatan anak dilakukan oleh

WNA (warga negara asing), hendaknya hal tersebut merupakan upaya hukum terakhir dengan menyelidiki dan mengetahui asal usul dari WNA tersebut.

2. Anak yang diangkat, hendaknya dijaga, dipelihara selayaknya seperti anak kandung, artinya akibat hukum yang ada sejak disahkan berdasarkan penetapan pengadilan sudah melekat padanya, teramsuk hak mewarisi dari orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004
- H. Achmad kamil & HM. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam, Hukum Adat, (edisi revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- PNH Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

II. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

III. Internet

<http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pengangkatan-anak-dalam-sistem.html>, diunduh, Jumat, 15 Juli 2016, jam. 21.27 wib

<http://rachmiamrinal.blogspot.co.id/2009/06/adopsi.html>, diunduh, Jumat, 15 Juli 2016, jam 21.53 wib

<https://www.google.co.id/#q=pengertian+perlindungan+anak>, di unduh, Jumat, 15 Juli 2016, jam. 19.0 wib